



KUMPULAN ABSTRAK JURNAL

KOLEKSI E-DEPOSIT PERPUSTAKAAN NASIONAL

TEMA POLITIK

2020



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Penyusun : Catur Fitri Widiyawati

Penyunting : Elah Laelasari

A GENDERED APPROACH TO FORCED MIGRATION GOVERNANCE IN THE ASIA PACIFIC

Annisa Dina Amalia

ABSTRAK

Kendati isu migrasi paksa telah menjadi perhatian global, debat antara akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi terus berlanjut. Dengan menggunakan lensa Feminism dalam Hubungan Internasional, penelitian ini berusaha membongkar karakter dari tata kelola migrasi paksa yang terlihat netral. Didukung oleh temuan di kawasan Asia Pasifik, tata kelola migrasi paksa sejatinya tergenderisasi. Hal ini dapat dilihat dari penggambaran dan respons yang diambil terhadap pengungsi oleh ASEAN dan Bali Process sebagai dua institusi utama yang mengelola isu migrasi paksa di kawasan. Tata kelola yang tergenderisasi ini terlihat dari dua aspek: (1) Feminisasi terhadap penggambaran isu pengungsi dengan pendekatan keamanan, dan (2) Penguatan persepsi negara sebagai pelindung yang maskulin dengan strategi sekuritisasi migrasi. Meskipun perspektif feminisme dalam hal ini menambah kompleksitas isu migrasi paksa, perspektif ini dapat menjelaskan bagaimana paradigma yang berpusat pada keamanan dan negara dapat direkonstruksi melalui rekonsiliasi antara akademisi kajian feminis dan Hubungan Internasional.

Kata kunci : Migrasi paksa, feminisasi Hubungan Internasional, pengungsi, pelindung maskulin, sekuritisasi migrasi

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 1 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i1.321

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/321/230>

INVESTIGATING MULTIPLE CITIZENSHIP IN INTERNATIONAL RELATIONS RETHINKING GLOBALISATION, NATION-STATES AND SOCIAL CONTRACT

Hyunji Kang

ABSTRAK

Kewarganegaraan jamak pernah dianggap menandakan ketidaksetiaan kepada negara bangsa dan mengancam sistem internasional yang berdaulat, sehingga dianggap sebagai ketidaknormalan yang harus dibatasi. Konsep kewarganegaraan jamak membuka menyediakan kesempatan untuk memperluas agenda riset HI dan mentransnasionalisasikan teori HI. Pertama, artikel ini mengajukan pandangan bahwasanya fokus analitis terhadap kewarganegaraan jamak memperkaya teori HI dengan mengamati kembali konsep - konsep pemikiran HI tradisional dan memungkinkan deteritorialisasi negara - bangsa yang berdaulat, dekonflasi antara bangsa dari negara, serta rekonsiderasi hubungan antara warga negara dengan negara-bangsa. Kedua, kewarganegaraan jamak dapat dimanfaatkan sebagai titik dasar dalam rekonsiderasi terhadap globalisasi dan masa depan negara-bangsa; memberikan kilasan terkait isu-isu mungkin memengaruhi lebih banyak kalangan dalam populasi global di masa depan. Dalam kesimpulannya, artikel ini menganjurkan pendalaman yang lebih serius terhadap kewarganegaraan jamak dalam ilmu HI.

Kata kunci : Kewarganegaraan jamak; transnasionalisme; globalisasi; negara bangsa; kedaulatan, Hubungan Internasional

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 1 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i1.315

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/315/228>

BUDAYA PATRIARKI DAN LOKALISASI NORMA PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

Gema Ramadhan Bastari

ABSTRAK

Makalah ini akan membahas tentang masalah seputar pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia. Secara umum, upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia terlalu banyak berfokus pada penegakan hukum pidana dan membatasi imigrasi daripada melindungi dan mencegah korban perdagangan manusia. Untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi, makalah ini akan menggunakan teori Amitav Acharya mengenai lokalisasi norma yang menyediakan kerangka untuk berasumsi bahwa norma pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia telah diappropriasi oleh nilai yang kontradiktif. Dengan menggunakan teori tersebut, makalah ini menemukan bahwa norma pemberantasan perdagangan manusia yang dipromosikan oleh Protokol Palermo bertentangan dengan budaya patriarki, sehingga budaya tersebut memiliki kepentingan untuk melokalisasi norma ini. Makalah ini menyimpulkan bahwa lokalisasi norma pemberantasan perdagangan manusia oleh budaya patriarki di Indonesia telah menghapus nilai keamanan manusia demi mengangkat keamanan negara.

Kata kunci : Lokalisasi norma, Perdagangan Manusia, Patriarki

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 1 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i1.282

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/282/231>

**OPERATION PROTECTIVE EDGE 2014 : JUSTIFIKASI ISRAEL
TERHADAP PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM
PRINSIP JUST WAR**

Dyah Lupita Sari

ABSTRAK

Perang Gaza 2014 tercatat sebagai konflik bersenjata ketiga yang terbesar antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Hamas menembakkan sejumlah roket dan mortar ke wilayah-wilayah strategis di Israel yang kemudian disambut oleh Israel dengan peluncuran Operation Protective Edge. Hal ini dianggap banyak kalangan melanggar Hukum Humaniter Internasional dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam Just War. Dengan melandaskan analisis pada pemeriksaan yang menyeluruh terhadap prinsip Just War, tulisan ini akan menjelaskan mengapa Israel dapat menjustifikasi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Operation Protective Edge. Tulisan ini berargumen bahwa faktor-faktor berikut memperkuat justifikasi Israel: 1. Kekuatan argumen hak atas self-defense; 2. Penggambaran Operation Protective Edge sebagai operasi militer yang proporsional; 3. Pandangan bahwasanya perang yang terjadi antara Israel-Hamas merupakan konflik asimetris; 4. Dukungan Amerika Serikat yang didasarkan pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kata kunci : Israel, Hamas, Operation Protective Edge, Just War, Jus ad bellum, Jus in bello, proporsionalitas, konflik asimetris, Amerika Serikat

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 1 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i1.314

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/314/232>

THE COMPLEX INTERPLAY OF EU-CHINA AND EU-HKSAR RELATIONS

Antonia Gough

ABSTRAK

Sejarah kolonial yang unik membuat Hong Kong menjalankan sistem kebijakan “Satu Negara, Dua Sistem Pemerintahan”. Pada masa awal Hong Kong dikembalikan, sistem kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah berarti. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, sistem kebijakan “Satu Negara, Dua Sistem Pemerintahan” mulai menuai ketegangan diantaranya terkait dengan Gerakan Payung 2014, penahanan mahasiswa yang melakukan demonstrasi, dan Rangkaian insiden penting seperti hilangnya lima orang penerbit buku. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap konsistensi Uni Eropa mempromosikan norma demokrasi dalam hubungannya dengan HKSAR. Dengan menggunakan teknik analisa wacana pada dokumen Uni Eropa yang relevan, artikel ini membahas dua hal. Pertama, menyelidiki apakah ketegangan yang terjadi mengarah pada kemungkinan sikap ke(tidak)konsistensian ujaran Uni Eropa dan bagaimana sebenarnya tindakannya mengenai perselisihan antara Hong Kong dan China. Kedua, menganalisa konsistensi wacana Uni Eropa yang sebagian besar menekankan promosi nilai dan norma demokrasi.

Kata kunci : Hubungan Uni Eropa-China, "Satu Negara, Dua Sistem", kebijakan luar negeri, wacana, hak pilih universal, hak asasi manusia

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 2 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i2.343

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/343/237>

KEBIJAKAN UNILATERAL PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL AUSTRALIA PASCA PEMILIHAN UMUM AUSTRALIA TAHUN 2013

Fakhrul Rizal Razak

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis pengambilan kebijakan militer dalam menanggulangi isu imigran ilegal di Australia pasca Pemilu Australia tahun 2013. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran dari sudut pandang sekuritisasi. Namun, dalam konteks Pemilu Australia 2013, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan mengapa isu ini disekuritisasi oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional sehingga menghasilkan kebijakan yang asertif dalam penanganan imigran ilegal. Dengan menggunakan strands of securitization, tulisan ini menjelaskan tujuan apa saja yang ingin dicapai oleh aktor sekuritisasi dari sekuritisasi isu imigran ilegal di Australia. Temuan tulisan ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan sejak masa kampanye hingga Pemerintahan Tony Abbot ditujukan untuk mengangkat isu imigran ilegal dalam agenda keamanan nasional karena kedaruratan isu ini dan legitimasi atas diambilnya tindakan luar biasa melalui Operation Sovereign Borders untuk mengeliminir ancaman dari kedatangan imigran ilegal ke Australia.

Kata kunci : Imigran ilegal, Pencari Suaka, Operasi Kedaulatan Perbatasan, Sekuritisasi

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 2 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i2.332

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/332/235>

**PENDEKATAN KONSEP HARMONI DALAM MANAJEMEN KONFLIK
OLEH JEPANG DALAM ISU SENGKETA SENKAKU / DIOAYU
DENGAN TIONGKOK**

Rudi Saeputra

ABSTRAK

Konflik Senkaku merupakan perseteruan Tiongkok-Jepang dalam memperebutkan gugusan delapan pulau karang yang terletak di Laut Tiongkok Timur. Kepulauan Senkaku berada di bawah kedaulatan pemerintah Jepang sejak 1895. Namun, Tiongkok menyanggah hal tersebut berdasarkan catatan sejarah. Tulisan ini menganalisis upaya repetitif damai Jepang dalam isu sengketa Kepulauan Senkaku / Diaoyu dengan Tiongkok. Sebagian besar kajian terdahulu belum menjelaskan alasan Jepang masih memilih mengusahakan upaya repetitif damai dalam meredam isu sengketa Kepulauan Senkaku / Diaoyu. Dengan menggunakan pendekatan konsep harmoni dalam manajemen konflik, tulisan ini menjabarkan falsafah budaya dan kepentingan nasional sebagai latar pilihan strategi Jepang dalam menangani isu sengketa Kepulauan Senkaku / Diaoyu. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa cara damai merupakan pilihan strategi Jepang yang sangat dipengaruhi oleh nilai budaya tradisional dan pencapaian kebutuhan ekonomi serta pertimbangan pengupayaan keamanan nasional Jepang.

Kata kunci : Konflik Senkaku, Tiongkok, Jepang, Kepulauan Senkaku / Diaoyu, Teori Manajemen Konflik

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 2 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i2.330

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/330/234>

GLOBALISASI INDUSTRI HIBURAN JEPANG DAN KOREA : PENGARUH TERHADAP PERSPEKTIF PUBLIK ANTAR NEGARA

Anniza Kemala

ABSTRAK

Meski dengan status kedua negara sebagai kekuatan besar di Asia Timur, hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan seringkali menemui tantangan dengan masih terdapatnya ketegangan yang disebabkan sejak masa Perang Dunia II. Kedua negara sama-sama menonjol dalam produk budaya populernya, termasuk dalam hal industri hiburan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketenaran industri hiburan kedua negara berhasil memunculkan kelompok-kelompok penggemar yang memiliki pandangan positif terhadap masing-masing negara sebagai hasil dari konsumsi produk industri hiburan yang telah mengglobal. Akan tetapi, globalisasi industri hiburan yang dilakukan oleh kedua negara tidak selalu memunculkan reaksi yang positif dari publik negara lawannya. Sebaliknya, globalisasi industri hiburan beserta aktor-aktor non-negara yang terlibat didalamnya terkadang seakan menjadi alat untuk meningkatkan ketegangan politik serta persaingan kedua negara hingga meningkatkan sentimen negatif yang telah ada di kalangan masyarakat.

Kata kunci : Globalisasi, Industri hiburan, J-pop, K-pop, Publik., Jepang, Korea

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 20, No 2 (2018)

Doi : 10.7454/global.v20i2.336

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/336/236>

JABHAT AL-NUSRA SEBAGAI AKTOR KEKERASAN NON-NEGARA PENTING DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH

Muhammad Rizky Nur Kamrullah

ABSTRAK

Peran aktor non-negara dalam politik dunia kontemporer semakin penting. Pasca 9/11, para ilmuwan studi keamanan dan praktisi keamanan mulai memperhatikan aktor non-negara yang biasa disebut sebagai kelompok teroris atau organisasi teroris. Penggunaan kekerasan oleh aktor tersebut membuat mereka dapat diklasifikasikan sebagai Aktor Non-Negara dengan Kekerasan (VNSA). Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas VNSA dapat mempengaruhi kebijakan keamanan negara dan memprovokasi negara untuk berperang melawan mereka. Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji Jabhat al-Nusra sebagai aktor yang terkait dengan Al-Qaeda dalam konflik bersenjata Suriah. Makalah ini berpendapat karakter potensial politik global VNSA di Jabhat al-Nusra adalah faktor yang membuat mereka dapat tumbuh menjadi aktor utama di antara kalangan pemberontak dan mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat dalam konflik bersenjata Suriah.

Kata kunci : Aktor Non-Negara dengan Kekerasan, konflik bersenjata Suriah, Al-Qaeda. Jabhat Al-Nusra, Terorisme, intervensi Amerika Serikat

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 19, No 2 (2017)

Doi : 10.7454/global.v19i2.287

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/287/218>

**ASSESSING COUNTRY'S RELIANCE ON RENEWABLE ENERGY
THROUGH ENERGY PROFILE AND POLITICAL ECONOMY
ASPECTS: A CROSS COUNTRIES STUDY FROM 1990 TO 2012**

Santi Hapsari Paramitha, Nurman Hidayat

ABSTRAK

Tulisan ini menguji hubungan antara ketergantungan negara terhadap energi terbarukan, profil energi, dan aspek ekonomi politik dengan menggunakan model data panel dinamis untuk sebuah panel global yang terdiri dari 43 negara. Komponen waktu dari dataset kami adalah inklusif 1990-2012. Penelitian ini menyelidiki hubungan sejumlah sub-sampel yang dibangun berdasarkan wilayah dimana negara-negara tersebut berada. Dengan cara tersebut, penelitian ini berakhir dengan beberapa sampel daerah; yaitu Barat, Asia, Timur Tengah (ME), Afrika, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), dan Amerika Latin. Pada bagian empiris, penelitian ini melakukan analisis berbasis wilayah untuk menangkap variasi dan penjelasan logis di belakangnya. Hasilnya menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor minyak, keterlibatan pada kesepakatan lingkungan internasional, pembangunan ekonomi, dan ketergantungan negara terhadap energi terbarukan merupakan sejumlah faktor yang signifikan secara statistik untuk mempengaruhi adopsi energi terbarukan di negara tersebut.

Kata kunci : Keamanan energi, energi terbarukan, profil energi, politik energi, ekonomi politik

Nama Jurnal : GLOBAL ; Jurnal Politik Internasional

Volume : 19, No 2 (2017)

Doi : 10.7454/global.v19i2.299

Link pdf : <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/299/220>